KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Berjanji Libatkan Publik Bahas Omnibus Law
Tanggal : Selasa, 18 Februari 2020
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

DPR Berjanji Libatkan Publik Bahas *Omnibus Law*

● FEBRIANTO ADI SAPUTRO, RONGGO ASTUNGKORO

JAKARTA — Pemerintah telah menyerahkan naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) alias *omnibus law* ke DPR pekan lalu. Meski belum bisa memastikan waktu pembahasannya, pihak DPR menjanjikan akan melibatkan seluruh pihak yang terdampak regulasi itu dalam pembahasannya nanti.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agats menuturkan, pihaknya siap melakukan pembahasan terkait RUU Ciptaker. Kendati demikian, sesuai dengan mekanisme, Baleg masih menunggu keputusan tersebut di Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Bamuslah nanti yang akan menentukan dan mengalokasikan ke alat kelengkapan mana yang harus dibahas, apakah di komisi di Baleg atau di pansus (panitia khusus)," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/2). Ia mengatakan, DPR akan menanti rapat Bamus DPR selepas rapat paripurna nanti, kemudian akan dilanjutkan dengan penyerahan naskah akademis dan draf RUU Ciptaker ke masing-masing fraksi.

Politikus Partai Gerindra itu mengaku belum bisa berandai-andai tentang target 100 hari bisa dicapai atau tidak. Namun, menurut dia, tidak menutup kemungkinan *omnibus law* bisa selesai lebih cepat jika seluruh fraksi sepakat pada substansinya.

Selain itu, ia juga menjanjikan bahwa Baleg akan melibatkan komponen yang ikut terkena dampak dari RUU tersebut. Sebab, menurut dia, *omnibus law* menyangkut soal tatanan kehidupan masyarakat. "Oleh karena itu, kita

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

DPR Berjanji Libatkan Publik Bahas Omnibus Law ..... *dari hlm 1*

berharap betul bahwa isu-isu yang selama ini beredar di publik itu bisa diantisipasi menyangkut substansinya oleh teman-teman fraksi di parlemen," ujar Supratman.

Namun, Ketua Baleg tidak memerinci maupun menjabarkan partisipasi publik macam apa yang bisa diakomodasi oleh DPR. Misalnya, partisipasi bisa dengan mengundang perwakilan publik secara langsung, perwakilan publik dari organisasi masyarakat maupun yang terkait, atau cukup sekadar dibahas DPR saja dengan asumsi DPR sudah merupakan kepanjangan tangan dari suara publik.

Perihal jadwal pembahasan, Baleg memastikan bahwa pembahasan RUU baru akan dilakukan pada masa sidang selanjutnya. Untuk diketahui, DPR akan memasuki masa reses 27 Februari 2020 mendatang. DPR baru akan kembali menggelar sidang 23 Maret 2020.

"Rasa-rasanya untuk pembahasan itu tidak mungkin di masa persidangan ini kecuali ada penugasan dari pimpinan berdasarkan Bamus bahwa ada keinginan untuk membahas ini di dalam masa reses. Itu boleh dimungkinkan," kata Supratman.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, RUU Cipta Kerja sedang berada dalam proses administrasi untuk diagendakan dalam rapat pimpinan. Ia menjelaskan, pembahasannya nanti sesuai mekanisme, yaitu melalui Baleg atau pansus.

"Antara pansus dan Baleg sama saja. Baleg *kan* gabungan dari berbagai komisi, pansus juga gabungan berbagai komisi. Kapasitasnya sama," ujar Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Ia pun meminta semua pihak untuk tak mempermasalahkan mekanisme pembahasannya. Sebab, antara Baleg atau pansus dinilainya memiliki kapasitas yang sama. "Tidak usah diperdebatkan. Yang perlu diperdebatkan substansi dan transparansi yang melakukan pembahasan," ujar Azis.

Meski begitu, ia lebih mendukung agar pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan di Baleg. Menurut dia, kapasitas dan kontennya dapat dilakukan secara komprehensif di Baleg. "Walaupun mekanisme Baleg itu harmonisasi dan singkronisasi terhadap suatu undang-undang," ujar Azis.

Ia juga menegaskan, DPR akan melibatkan semua pihak dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun, sejumlah pihak tertentu dapat mengusulkan agar pembahasan dilakukan secara tertutup. "Pihak tertentu itu siapa? Bisa anggota, pemerintah, meminta dilakukan tertutup. Tapi, tertutup tidak bisa menyeluruh, harus parsial," ujar politikus Partai Golkar itu.

Wacana *omnibus law* atau penyederhanaan regulasi diungkap Presiden Joko Widodo selepas pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Sidang Paripurna MPR, akhir tahun lalu. Jokowi sat itu mengharapkan DPR bisa merampungkan pembahasan regulasi itu 100 hari setelah

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

diserahkan draf rancangannya oleh pemerintah.

Rancangan regulasi itu dilakukan lintas kementerian dengan melibatkan kalangan pengusaha. Perwakilan dari asosiasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota juga dilibatkan.

Sejauh ini, sejumlah pasal-pasal dalam draf RUU Ciptaker yang diserahkan ke DPR sudah mulai .mendapatkan sorotan masyarakat. Asosiasi buruh, misalnya, menyoal sejumlah pasal yang dikhawatirkan bakal menghilangkan pesangon dan membatasi cuti serta melanggengkan sistem kontrak.

Sedangkan, sejumlah pegiat pers menyoal pasal-pasal dalam regulasi itu yang dinilai berpotensi memidanakan perusahaan pers secara sewenang-wenang.

Kepala-kepala daerah juga mempertanyakan hilangnya sejumlah kewenangan perizinan yang sebelumnya diamanatkan ke pemerintah daerah.

Terkait penolakan-penolakan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melihatnya sebagai hal yang positif. Menurut dia, dengan begitu maka akan terdapat banyak masukan yang akan menambah bagus RUU tersebut. "Silakan ditolak. Itu *kan* bukan undang-undang, baru RUU. Kalau Anda punya masukan, buruh punya masukan, sekarang waktunya," kata Mahfud di Jakarta Selatan, Senin (17/2).

Masukan-masukan tersebut, kata Mahfud, dapat disampaikan saat pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR. Selain itu, dalam proses pembahasan RUU itu, DPR juga dapat secara khusus mengundang atau minta didatangi pihak-pihak yang sekiranya dapat memberikan masukan kepada mereka.

"Secara khusus, dia (pihak yang keberatan) bisa mengundang, dia bisa minta didatangi, 'Saya mau memberikan pasal sekian, pasal sekian.' Kalau *ndak* bisa, lewat saya. Nanti saya yang sampaikan ke DPR," kata Mahfud. Ia menekankan, proses pembentukan peraturan tersebut terbuka dan dapat menerima masukan berbagai pihak.

Soal pelibatan publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja nantinya, pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan sudah menyiapkan daftar permasalahan yang disebabkan oleh RUU Cipta Kerja. Draf itu kemudian akan dipercayakan ke anggota DPR yang membahas RUU tersebut. "Draf sandingan KSPI lebih sebagai sebuah argumentasi yang dipersiapkan mengapa KSPI dan buruh Indonesia menolak draf RUU tersebut," ujar Said.

Sedangkan Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil akan mengundang seluruh bupati dan wali kota se-Jabar untuk membahas lebih dalam tentang RUU Cipta Kerja pada 27 Februari di Bandung. "Jadi Menteri Hukum dan HAM dan Mendagri akan kita hadirkan dan juga akan kita hadirkan seluruh kepada daerah akan ada pembahasan itu dan relevansinya kepada perda yang harus disinkronisasi apakah dihapus atau disempurnakan, jadi aspirasi kita didengarkan," kata Ridwan Kamil, Senin. ■ nawir arsyad akbar/arie lukihardianti **ed:** fitriyan zamzami

PERPUSTAKAAN DPR-RI